BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri melalui otonomi daerah, menyebabkan terbentuknya daerah-daerah pemekaran. Pemekaran daerah menyebabkan pemilihan kepala daerah juga akan dilaksanakan pada daerah pemekaran. Tujuan memekarkan daerahnya ialah untuk memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.[1]

Pemekaran daerah dilakukan oleh aktor-aktor politik daerah yang menjadi penggerak utama dalam usaha memisahkan daerah induk dengan daerah yang dimekarkan. Aktor politik penggerak pemekaran berada dalam posisi sebagai birokrat senior daerah maupun pusat, elite etnik, politisi, tokoh LSM dan tokoh adat.[2] Salah satu contoh pemekaran yang digerakan oleh aktor politik daerah dan pusat ialah di Kabupaten Dharmasraya. Pemekaran terjadi atas dasar gerakan yang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

---

[1] Peraturan pemerintah no 129 tahun 2000 Tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah

[2] Leo Agustino dan Muhammad Agus Yusoff. 2010. Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongman dan Roving Bandits. *Jurnal of History, Politics & Strategic Studies.* Volume 37. 86-104

dilakukan oleh Hasan Zaini (Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung) dan Dasril Panin (Anggota DPR RI 1993-1996).

Kabupaten Dharmasraya dibentuk dari pemekaran dengan Sawahlunto/Sijunjung berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten baru secara resmi pertama kali memiliki bupati yang sah melalui pemilihan bupati dan wakil bupati pada 12 Agustus 2005, bupati dan wakil yang pernah menjabat masih tergolong sedikit, sampai saat ini baru memasuki periode ke-empat kepemimpinan.

Tabel 1.1
Periode Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya

No	Bupati – Wakil Bupati	Periode
1	Marlon Martua-Tugimin	2005-2010
2	Adi Gunawan-Syafruddin R	2010-2015
3	Sutan Riska Tuanku Kerajaan-Amrizal Datuak Rajo Medan	2016-2021
4	Sutan Riska Tuanku Kerajaan-Dasril Panin Datuk Labuan	2021-2024

Sumber: diolah oleh peneliti

Kabupaten Dharmasraya pada pemerintahan periode pertama, kedua dan keempat, posisi pemerintahan diisi oleh kepemimpinan calon yang berasal dari tokoh pemekaran Dharmasraya. Marlon dengan Tugimin pada (2005-2010 pemerintahan periode pertama), Adi Gunawan dengan Syafrudin R (2010-2015, Pemerintahan periode ke -2), dan Sutan Riska dengan Dasril Panin Datuak Labuan (2021-2026, Pemerintahan periode ke-4), pada pemerintahan Periode ke-2, tokoh pemekaran yang mendapatkan posisi kepemimpinan Dharmasraya ialah bupati dan

wakilnya, dan pada pemerintahan periode ke-4 tokoh pemekaran yang mengisi jabatan ialah pada posisi wakil bupati, yakni Dasril Panin Datuk Labuan.

Data diatas menunjukan adanya posisi cukup kuat bagi kelompok pemekaran untuk mempengaruhi proses kebijakan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, hal ini dikarenakan adanya beberapa dari anggota mereka didalam pemerintahan. Kelompok pemekaran memiliki kekuatan dalam proses pembuatan kebijakan, terlebih lagi adanya jabatan-jabatan yang saat diisi oleh tokoh pemekaran pada berbagai pemerintahan Dharmasraya selain dari posisi Bupati/wakilnya, seperti:

Tabel 1.2
Tokoh pemekaran dan jabatan pemerintahan tahun 2019-2024.

Nama	Jabatan tokoh pemekaran	Jabatan pemerintahan
Adi Gunawan	Ketua	Wakil DPRD Kabupaten Dharmasraya 2019
Rasul hamidi	Tokoh masyarakat	Wali Nagari Sungai Rumbai 2020
Dasril Panin Datuk Labuan	Penasehat	Wakil Bupati 2021-2024
Masrul Maas	Bendahara	Ketua DPRD 2015-2019

Sumber: diolah oleh peneliti

Kelompok pemekaran memiliki peran sebagai kelompok penting terbentuknya Kabupaten Dharmasraya, tentunya peran tersebut dalam konteks politik lokal yang sangat menentukan nasib masyarakat lokal.[3] Dukungan masyarakat berperan penting dalam sebuah gerakan perubahan. Dukungan dari

[3] Abdul, Chalik. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

berbagai elemen juga merupakan kekuatan politik yang kuat[4]. Sebab tak hanya dari aktor politik saja yang menginginkan pemekaran, sehingga awal terbentuknya keinginan untuk memekarkan diri merupakan cerminan dari menguatnya peranan kekuatan-kekuatan politik.

Tokoh pemekaran termasuk kedalam suatu kelompok kepentingan. Kelompok pemekaran di Kabupaten Dharmasraya memiliki kepentingan dalam pemerintahan, yang mana kepentingan itu ialah sesuai dengan tujuan pemekaran yang tercantum didalam PP no 129 tahun 200 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Kelompok pemekaran Kabupaten Dharmasraya merupakan sebuah kelompok kepanitiaan yang memiliki struktur kepengurusan dan merupakan suatu kelompok kepentingan, karena didalamnya ada struktur kepengurusan serta adanya suatu bentuk gerakan dalam pemberian saran dan pendapat kepada pemerintah daerah untuk suatu kebijakan, dalam suatu wawancara dengan ketua kelompok pemekaran[5].

> *"Kontribusi dari kelompok pemekaran dalam memajukan Dharmasraya ialah berupa pemberian saran kepada pemerintah daerah agar dibuat suatu kebijakan yang menyangkut kesejahteraan warga, pemeliharaan nilai adat dan agama, serta majukan pendidikan generasi muda, dan perbaiki infrastruktur perhubungan, dan ada salah satu saran kebijakan yang diterima pemerintah daerah, yakni pembangunan di Kecamatan Asam Jujuhan Nagari Lubuk Besar yang tertinggal dan terisolir"*

Peran kelompok pemekaran dalam pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terhadap proses kebijakan didasari atas kelompok pemekaran sebagai yang

---

[4] Asrinaldi. 2014. *Kekuatan kekuatan Politik di Indonesia.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

[5] Adi gunawan. (21 juli, 2022). *Personal Interview*

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

memberikan masukan dan saran dan diterima oleh pemerintah daerah Dharmasraya, dalam hal ini kelompok pemekaran cukup berperan penting untuk pemerintahan Dharmasraya. Serta tokoh pemekaran Kabupaten Dharmasraya juga cukup mencolok dalam pemerintahan Dharmasraya terlihat dari statement yang dikeluarkan asrul syukur yang merupakan tokoh pemekaran Dharmasraya, mengenai pemilihan kepala daerah melalui wawancara dengan wartawan melalui telepon seluler[6].

> *"Untuk menjadi seorang Bupati meskipun harus bersusah payah meraih dukungan masyarakat melalui pemilihan langsung, namun tidak sesulit ketika jabatan tersebut bisa diraih, pilihlah pemimpin dari kalangan anak muda yang cerdas, memiliki jaringan politik yang kuat dan diakui pada level pemerintah pusat, mengandalkan program pembangunan yang pro rakyat serta memiliki kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan adalah solusi terbaik untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Dharmasraya"*

Kelompok pemekaran Kabupaten Dharmasraya memperlihatkan adanya indikasi saling mendukung diantara tokoh pemekaran. Dukungan diberikan oleh ketua tokoh pemekaran yakni Adi Gunawan pada pasangan Sutan Riska dan Dasril Panin Labuan dengan statement[7] sebagai berikut.

> *"Sosok dari Dasril Panin Dt Labuan yang turut ikut serta dalam memeriahkan pertarungan pemilihan kepala daerah tahun 2020 tidak perlu diragukan lagi kepiawaiannya, karena dulu Dt Labuan merupakan tokoh yang berjuang memekarkan Dharmasraya dari induknya, berkat kepiawaiannya Dharmasraya yang sebelumnya tertingkal setelah dimekarkan dapat berkembang pesat"*

Kelompok pemekaran sebagai kelompok kepentingan menunjukan adanya suatu gerakan politik praktis dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kelompok pemekaran juga menjadi kelompok penting yang cukup eksis di

---

[6] Tokoh masyarakat: sosok pemimpin yang ideal itu masih tertumpang pada individu bupati petahana. https://sumbar.kabardaerah.com/2020/. Diakses pada 21 juli 2020 pukul 14.35 Wib

[7] Pilarbangsa. Adi Gunawan: Dharmasraya Mekar Karena Campur Tangan Dt Labuan. Di akses pada Pukul 21:02 Kamis 16 Juni 2022. pilarbangsanews.com

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Kabupaten Dharmasraya. Pada saat hari ulang tahun Kabupaten Dharmasraya ke-18 pada tahun 2022 yang juga digelarnya rapat sidang paripurna yang dihadiri tokoh-tokoh penting seperti, Mahyeldi (Gubernur Sumatera barat), Bupati Dharmasraya dan wakilnya, ketua DPRD Dharmasraya, Kabupaten tetangga, ninik mamak dan bundo kandung, serta tokoh pemekaran Dharmasraya[8], dalam hal ini cukup memperlihatkan adanya eksistensi dari kelompok pemekaran sebagai kelompok penting Kabupaten Dharmasraya.

Berbagai studi tentang peran dari juga telah diungkapkan penelitian terdahulu, sehingga menambah referensi didalam studi penelitian ini, seperti penelitian yang dipaparkan oleh Ikhsan Darmawan, yang berjudul Peran dan Strategi Kelompok "Kotak Kosong" Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan. Penelitian terdahulu ini dilatarbelakangi oleh suatu fenomena pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Pati. Pemilihan kepala darah di Kabupaten Pati terdapat jumlah suara yang diperoleh oleh piihan "kotak kosong" yang paling tinggi dibanding dengan kabupaten lainnya. penelitian ini mempertanyakan tentang bagaimana Peran dan Strategi dari kelompok "kotak kosong" dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Pati tahun 2017. Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan Kualitatif, dengan metode wawancara[9]

---

[8] Nova anggraini. (8 januari 2022). HUT Kabupaten Dharmasraya ke-18, DPRD gelar sidang paripurna. Diakses pada pukul 13.30 WIB kamis 21 juli 2022. www.harianhaluan.com/news/. Diakses pada 21 juli 2020 pukul 14.40

[9] Ikhsan Darmawan. 2017. Peran dan Strategi Kelompok Kepentingan "Kotak Kosong" dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan. *J Wacana Politik.* 2 (1). 45-51

Peneliti melihat adanya perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Bahwa adanya perbedaan dari sisi kelompok kepentingan pada pemilihan kepala daerah. Penelitian tentang Strategi kelompok pemekaran daerah belum ada yang meneteliti. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas strategi dari suatu hal yang memang sudah ada didalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah seperti strategi partai politik. Penelitian ini membahas strategi lebih mendetail, dengan melihat tokoh pemekaran dan jaringan hubungan dengan pemerintah, eksistensinya, dan pengaruhnya pada pemerintahan. Penelitian yang peneliti lakukan ini lebih kepada strategi tokoh pemekaran terhadap pemerintahan lokal dan juga tokoh pemekaran ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah walaupun tidaklah terlalu kuat, serta penelitian tentang kelompok pemekaran biasanya lebih banyak membahas tentang dampak-dampak pemekaran itu sendiri dan belum ditemukan penelitian tentang strategi tokoh pemekaran pada pemilihan pemerintahan lokal suatu daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Kelompok pemekaran di Kabupaten Dharmasraya merupakan sebuah kepanitiaan terhadap pemekaran Dharmasraya yang memiliki struktur kepengurusan dan merupakan suatu kelompok kepentingan, karena didalamnya ada struktur kepengurusan serta adanya suatu bentuk gerakan dalam pemberian saran dan pendapat kepada pemerintah daerah untuk suatu kebijakan pemerintah, seperti kebijakan untuk segara melakukan pembangunan daerah yang tertinggal (Kecamatan Asam Jujuhan Nagari Lubuk besar).

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Keberadaan tokoh pemekaran di Dharmasraya menjadikannya tokoh penting dalam pemerintahan. Melihat fakta di Kabupaten Dharmasraya, bahwa bupati kepemimpinan periode ke-dua adalah seorang ketua pemekaran, dan wakil bupati periode ke-empat yang baru saja dilantik adalah penasehat dari tokoh pemekaran kabupaten Dharmasraya. Kuatnya keberadaan tokoh pemekaran di Dharmasraya menjadikannya tokoh penting dalam pemerintahan.

Keberadaan tokoh pemekran didalam pemerintah daerah memungkinkan mudahnya kelompok pemekaran mempengaruhi proses kebijakan daerah. Peran tokoh pemekaran dalam pemerintahan juga mencapai titik eksistensinya pada pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Diundangnya tokoh pemekaran pada hari ulang tahun Kabupaten Dharmasraya ke-18 pada ditahun 2022 yang juga digelarnya rapat sidang paripurna yang dihadiri tokoh-tokoh penting yakni, Mahyeldi (Gubernur Sumatera barat), Bupati Dharmasraya dan wakilnya, ketua DPRD Dharmasraya, Kabupaten tetangga, ninik mamak dan bundo kandung, serta tokoh pemekaran Dharmasraya[10]. Memperlihatkan adanya eksistensi dari kelompok pemekaran sebagai kelompok penting Kabupaten Dharmasraya.

Tokoh pemekaran juga muncul pada pemilihan kepala daerah dalam memberikan tanggapan ataupun statement di media. Pesan yang disampaikan oleh tokoh pemekaran pada pemilih untuk memilih calon yang memiliki rekam jejak yang baik terlebih lagi rekam jejak kepemimpinannya, sesuai yang disampaikan oleh Asrul Syukur, selaku tokoh pemekaran Dharmasraya. Peran tokoh pemekaran

[10] Nova anggraini. (8 januari 2022). HUT Kabupaten Dharmasraya ke-18, DPRD gelar sidang paripurna. Diakses pada pukul 13.30 WIB kamis 21 juli 2022. www.harianhaluan.com/news/

terhadap pemilihan kepala daerah bisa terlihat oleh masyarakat dikarenakan adanya jaringan dengan pemerintah daerah, sehingga eksistensinya sampai saat ini masih ada, dan juga berperannya tokoh pemekaran dalam proses pembuatan kebijakan daerah.

Keberadaan kelompok pemekaran sebagai suatu kelompok kepentingan cukup eksis dalam hal mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kekuatan dari kelompok kepentingan berasal dari tiap tokoh-tokoh yang ada didalamnya. Jaringan yang dimiliki kelompok kepentingan menjadi penentu agenda, penggalang isu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepala pemerintah. [11] Kelompok kepentingan tidak hanya tentang kepentingan pribadi privat kelompoknya saja, akan tetapi kepentingan publik juga akan diangkat menjadi kepentingannya apabila sejalan dengan tujuan dari kelompoknya. Kepentingan individu didalam kelompok juga menjadi bagian dari dalam kelompok kepentingan. Individu yang berada didalam struktur pemerintahan menjadi kekuatan dari kelompok kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari dalam pemerintahan.

Masyarakat perlu adanya kontrol kelompok atas perilaku elit, perlu adanya orang-orang didalam kelompok agar menjadi suatu faktor yang mendukung masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan menjadi suatu hal yang kuat untuk jalannya keputusan politik.[12] Kelompok pemekaran termasuk kedalam kelompok kepentingan Nonasosiasonal berdasarkan status yang dilatarbelakangi oleh tokoh-tokoh pemekaran. Adanya jaringan kelompok pemekaran Kabupaten Dharmasraya

---

[11] Muhammad Maiwan. 2016. Kelompok kepentingan (Interest group), kekuasaan dan kedudukannya dalam sistem politik. *J Ilmiah Mimbar Demokrasi.* 15 (2).75-91

[12] Gabriel A. Almond dan G. Bringham Powell, Jr. 1966. *Comparative politics: a developmental approach.* Canada. Little Brown and Company (E-Book).

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

sebagai kelompok kepentingan, terlihat pada struktur pemerintahan yang juga pernah diisi oleh beberapa dari kelompok pemekaran Dharmasraya:

Tabel 1.3
Tokoh pemekaran yang pernah menjabat di pemerintahan Kabupaten Dharmasraya

Nama	Jabatan tokoh pemekaran	Jabatan pemerintahan
Adi Gunawan	Ketua	Wakil DPRD Kabupaten Dharmasraya 2019
Rasul hamidi	Wakil ketua	Wali Nagari Sungai Rumbai
Dasril Panin Datuk Labuan	Tim Ahli	Wakil Bupati 2021-2024
Masrul Maas	Bendahara	Ketua DPRD 2015-2019
Masrigi Rajo Lelo	Sekretaris	DPC partai demokrat 2018
Leli arni	Bidang Wanita	Anggota DPRD Plt Sekda Dharmasraya 2015 DPRD Provinsi 2019-2024

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan data yang didapatkan, adanya hubungan antara kelompok pemekaran Kabupaten Dharmasraya dengan pemerintah daerah menjadi suatu kedetakatan diantara posisi dari dalam pemerintah dan dari luar pemerintah. Kedekatan ini menjadi suatu hal yang menarik jika dikaitkan dengan bagaimana strategi dari kelompok pemekaran Kabupaten Dharmasraya untuk memperkuat eksistensinya dalam politik lokal pemerintahan Kabupaten Dharmasraya di tahun 2020. Data yang peneliti dapatkan bahwa, 3 dari 4 periode pemerintahan Kabupaten Dharmasraya diisi oleh tokoh pemekaran didalamnya, yakni Marlon Martua dengan Tugumin (2005-2010 pemerintahan periode 1), Adi Gunawan dengan Syafrudin R (2010-2015, Pemerintahan Periode ke -2), dan Sutan Riska dengan Dasril Panin

Datuak Labuan (2021-2026, Pemerintahan Periode ke-4), pada pemerintahan Periode ke-2, tokoh pemekaran yang mendapatkan posisi kepemimpinan Dharmasraya ialah Bupati dan wakilnya, dan pada pemerintahan periode ke-4 tokoh pemekaran yang mengisi jabatan ialah pada posisi wakil bupati, yakni Dasril Panin Datuk Labuan.

Dalam penelitian ini peneliti melihat strategi kelompok pemekaran dari adanya eksistensi mereka terhadap pemilihan kepala daerah. Adanya asumsi bahwa strategi kelompok pemekaran pada pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh adanya eksistensi, indikasi dukungan sesama kelompok pemekaran dan adanya jaringan hubungan antara kelompok pemekaran dan pemerintah daerah, sehingga keberadaan kelompok pemekaran akan mendapatkan kemudahan dengan adanya jabatan dari adanya tokoh pemerakan didalam pemerintahan.

Maka dari itu, dirumuskanlah pertanyaan penelitian yakni, bagaimanakah strategi dari tokoh pemekaran sebagai bagian dari kelompok kepentingan dalam menjaga eksistensinya pada pemerintahan daerah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

a. Menjelaskan serta menganalisis Strategi tokoh pemekaran daerah sebagai bagian dari kelompok kepentingan dalam menjaga

eksistensinya pada pemerintahan daerah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjelaskan tentang strategi tokoh pemekaran sebagai kelompok kepentingan dalam pemerintahan lokal. Serta memberikan informasi dan mengisi kajian data terbaru dalam perspektif kelompok kepentingan, mengenai strategi kelompok kepentingan didalam pemerintahan, sehingga menjadi suatu referensi tembahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti tentang strategi kelompok kepentingan, terutama kelompok pemekaran, khususnya memperkaya khasanah dalam ilmu politik

1.4.2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai arah pedoman masyarakat dalam menanggapi strategi kelompok kepentingan, serta menjadi acuan bagi masyarakat dalam menanggapi suatu kelompok kepentingan mempengaruhi kebijakan, serta menjadi acuan bagi kelompok-kelompok kepentingan pemerintahan daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA